

BAB IV

ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH DUKUN PENGGANDAAN UANG

A. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang Tindak Pidana Penipuan oleh Dukun Penggandaan Uang

Dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang yang dilakukan oleh Hariyanto bin Rakijo (53 tahun), Riyanto bin Awi (46 tahun), dan Jumari bin Yitno Alwar (48 tahun). Mereka yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan sopir mengaku sebagai orang pintar yang bisa menggandakan uang yang kenyataannya tidak bisa mereka lakukan.

Ada 3 saksi yang terdapat dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg yaitu Yeni Irawati binti Buat, Sampurno bin Toaji, dan Hariyanto bin Abdul Manan yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lamongan.

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Lamongan dalam menyelesaikan kasus

Dalam memutuskan perkara tersebut yang lebih diutamakan adalah melihat dari kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan para terdakwa adalah para terdakwa merugikan korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan para terdakwa belum pernah di hukum. Motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena ingin memperoleh keuntungan dari korban yang di tipunya dengan cara menggandakan uang.

² Ibid., 22.

Dalam penjatuhan pidana Hakim bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriousness delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya, dan lain-lain.³

Pada tuntutan awal yang diberikan oleh penuntut umum adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dalam rutan. Namun oleh Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hariyanto bin Rakijo selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, sedangkan untuk terdakwa Riyanto bin Awi dan Jumari bin Yitno Alwar dijatuhi pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dan membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat Hakim juga mempunyai otoritas dalam memberikan berat atau ringannya hukumana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Namun menurut penulis, hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim terlalu

[illegible]

ringan, terutama hukuman terhadap terdakwa Hariyanto bin Rakijo. Terdakwa Hariyanto bin Rakijo hanya mendapat hukuman penjara 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari lebih ringan dari hukuman penjara yang diperoleh oleh Riyanto bin Awi dan Jumari bin Yitno Alwar yaitu masing-masing 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari. Sedangkan terdakwa Hariyanto bin Rakijo lebih banyak mengambil keuntungan dari perbuatan tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang yaitu Rp. 21.000.000,00,- (dua puluh satu juta rupiah), dan kedua terdakwa hanya Rp. 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi dalam Amar Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam Direktori Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN. Lmg tentang tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang hukuman penjara terdakwa Hariyanto bin Rakijo lebih ringan daripada terdakwa Riyanto bin Awi dan Jumari bin Yitno Alwar. Hukuman yang diterima oleh terdakwa terbilang sangat ringan meskipun kerugiannya terbilang sedikit. Tapi, di sini harus pula memperhatikan kemaslahatan masyarakat juga. Apabila hukuman yang diterima para terdakwa sangat ringan, maka para terdakwa tidak akan jera dalam melakukan tindak pidana yang sama bahkan bisa yang lebih bahaya dan bahkan bisa merugikan calon-calon korban lainnya lebih besar. Seharusnya dalam kasus ini Majelis Hakim memutuskan hukuman penjara sesuai dengan Pasal 378 KUHP yaitu ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

tatanan sosial, budaya politik, hukum, dan sebagainya.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada mengenai tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang, dan juga berbagai landasan hukum yang dipakai oleh Hakim menyelesaikan kasus, maka dapat dilihat bahwa kasus yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Lamongan adalah kasus tindak pidana oleh dukun penggandaan uang. Dimaksudkan demikian karena perbuatan dilakukan terhadap barang, dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu.

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi keluarga dalam merupakan suatu keharusan, keluarga merupakan amanah dan karunia Swt. yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seutuhnya.

tatanan sosial, budaya politik, hukum, dan sebagainya.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada mengenai tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang, dan juga berbagai landasan hukum yang dipakai oleh Hakim menyelesaikan kasus, maka dapat dilihat bahwa kasus yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Lamongan adalah kasus tindak pidana oleh dukun penggandaan uang. Dimaksudkan demikian karena perbuatan dilakukan terhadap barang, dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu.

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi keluarga dalam merupakan suatu keharusan, keluarga merupakan amanah dan karunia Swt. yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seutuhnya.

tatanan sosial, budaya politik, hukum, dan sebagainya.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada mengenai tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang, dan juga berbagai landasan hukum yang dipakai oleh Hakim menyelesaikan kasus, maka dapat dilihat bahwa kasus yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Lamongan adalah kasus tindak pidana oleh dukun penggandaan uang. Dimaksudkan demikian karena perbuatan dilakukan terhadap barang, dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu.

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi keluarga dalam merupakan suatu keharusan, keluarga merupakan amanah dan karunia Swt. yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seutuhnya.

tatanan sosial, budaya politik, hukum, dan sebagainya.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada mengenai tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang, dan juga berbagai landasan hukum yang dipakai oleh Hakim menyelesaikan kasus, maka dapat dilihat bahwa kasus yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Lamongan adalah kasus tindak pidana oleh dukun penggandaan uang. Dimaksudkan demikian karena perbuatan dilakukan terhadap barang, dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu.

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi keluarga dalam merupakan suatu keharusan, keluarga merupakan amanah dan karunia Swt. yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seutuhnya.

tatanan sosial, budaya politik, hukum, dan sebagainya.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada mengenai tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang, dan juga berbagai landasan hukum yang dipakai oleh Hakim menyelesaikan kasus, maka dapat dilihat bahwa kasus yang diputus Hakim Pengadilan Negeri Lamongan adalah kasus tindak pidana oleh dukun penggandaan uang. Dimaksudkan demikian karena perbuatan dilakukan terhadap barang, dalam keadaan, waktu dan cara-cara tertentu.

Perintah untuk menjaga sekaligus melindungi keluarga dalam merupakan suatu keharusan, keluarga merupakan amanah dan karunia Swt. yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seutuhnya.

menjawab kejahatan penipuan oleh dukun penggandaan uang yang terjadi dan semakin merajalela serta sangat memprihatinkan.

Hukum Islam disyari’atkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia.⁴ Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi :⁵

1. حفظ الدين : memelihara agama
2. حفظ النفس : memelihara jiwa
3. حفظ العقل : memelihara akal
4. حفظ النسل : memelihara kehormatan
5. حفظ المال : memelihara harta

Tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang tidak hanya merusak atau menanggung aib keluarga, melainkan juga telah menyimpang dari ajaran agama. Sehingga secara tidak langsung tindak pidana penipuan telah merusak kehidupan manusia yang semestinya dipelihara dan dijaga.

Sedangkan unsur-unsur penipuan dalam hukum pidana Islam sesuai dengan definisinya yaitu mengambil harta orang lain, harta yang diambil merupakan milik sah orang lain yang hartanya ditipu dan ada itikad tidak

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 65.

⁵ TM Hasbi Ash Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 129.

Dalam fikih terdapat kaidah tentang kemaslahatan yaitu :

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan⁷

Kerusakan yang ditimbulkan dalam tindak pidana penipuan oleh dukun penggandaan uang lebih besar daripada manfaatnya, pemberian hukuman dimaksudkan sebagai tindakan preventif dalam menanggulangi penipuan oleh dukun penggandaan uang sehingga pemberian hukuman terhadap pelaku penipuan oleh dukun penggandaan uang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas jelas bahwa faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggungjawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan

⁷ Ach. Fajruddin Fatwa, dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 172.

بِإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Dalam Islam apabila seseorang melakukan perbuatan (jarimah) atau tindak pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun karena Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan

[illegible]

ketentruman serta kedamaian, maka pelaku jarimah akan dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang di dalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran (takzir). Takzir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sedangkan secara terminologis dapat didefinisikan sebagai berikut :

التَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدِّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَانٌ مِقْدَارُهَا وَتَرَكَ تَقْدِيرَ هَالِكٍ أَوْ لِيٍّ الْأَمْرَ وَالْقَاضِي

المُجَاهِدِينَ

Takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syarak dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau Hakim.⁹

Dalam takzir, hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, sehingga Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam kehidupan manusia yang bermacam-macam berdasarkan metode-metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengambil harta orang lain dan mengganggu kedamaian serta ketentraman masyarakat.

Bentuk hukuman takzir tidak ditentukan dalam hukum Islam agar memungkinkan *waliyyul amri* atau Hakim memilih hukuman mana yang

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140-141.

[illegible]

[illegible]